

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi daerah adalah sebuah jembatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Sehingga masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan serta mewujudkan keinginannya. Pada dasarnya suatu bangsa maupun negara melakukan pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk mengupayakan peningkatan taraf hidup ataupun kesejahteraan rakyatnya dengan mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator atas keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno dalam (A. I. Sari, 2017) pengertian pembangunan dan pertumbuhan adalah dua hal yang berbeda, pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur yang menggambarkan kondisi perkembangan kegiatan perekonomian dari periode tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yakni tingkat pertumbuhan daerah itu sendiri atau Produk Regional Domestik Bruto Nasional (PDRB). Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses ekonomi yang memicu peningkatan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk pada suatu negara dalam jangka panjang.

Akan tetapi pada realitanya sejauh ini, hanya ditunjukkan bahwa pembangunan semata-mata sekedar mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi saja, bukan peningkatan taraf hidup masyarakat. Artinya, selama ini tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunannya. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi dianggap berhasil apabila suatu wilayah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan merata. Hal ini dikarenakan kunci tujuan pembangunan ekonomi selain mewujudkan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, harus pula diimbangi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran serta semakin rendahnya disparitas pendapatan antar wilayah maupun antar sektor (Fitriyah & Rachmawati, 2013).

Dilihat dari kondisi geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi dan termasuk kedalam negara sedang berkembang (NSB) serta memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-beda tiap daerah. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketimpangan pendapatan yang cukup serius, permasalahan ini merupakan ujian bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pemerataan sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan akan terwujud. Disparitas atau ketimpangan pendapatan ini adalah permasalahan yang tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, melainkan juga dialami oleh negara-negara miskin dan berkembang diseluruh dunia.

(Ambar et al., 2021) mengatakan bahwa pembangunan dalam skala nasional tidak selalu dilakukan secara sistematis, sejumlah daerah telah mencapai pertumbuhan yang cepat dan sementara daerah lain tumbuh lambat.

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, peran modal (investor) cenderung memilih daerah perkotaan atau daerah yang sudah memiliki infrastruktur transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, bank, asuransi dan fasilitas lainnya. Selain itu, perbedaan potensi dan fasilitas masing-masing daerah akan mengakibatkan industri atau kegiatan ekonomi berkumpul dan membentuk aglomerasi. Karena itu, atensi pemerintah wajib tertuju pada seluruh wilayah tanpa terdapat perlakuan spesial pada wilayah tertentu saja.

Pencapaian tujuan secara bertahap dan berkesinambungan dicapai melalui perencanaan pembangunan dengan menggali, mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi dan hasilnya diarahkan untuk pembangunan nasional. Diperlukan model perencanaan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan sektor ekonomi pada suatu daerah (Tarigan, 2016). Seperti yang diungkapkan (A. I. Sari, 2017) karena sektor basis ekonomi adalah sektor yang paling berpengaruh terhadap keadaan ekonomi, diharapkan daerah- daerah dapat menggali potensi sektor-sektor basis ekonomi yang ada agar terciptanya kemandirian tiap daerah dan dapat dilakukannya pengurangan ketimpangan pendapatan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antara daerah satu dengan yang lainnya.

Pemerintah mengesahkan Undang – Undang No 32 tahun 2004 yang berisi pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri yang berarti terdapat pembagian tanggung jawab yang harus dijalankan agar terciptanya kemandirian secara ekonomi dalam mengelola potensi ekonomi yang ada sehingga memungkinkan tercapainya pembangunan

ekonomi daerah yang merata. Pelimpahan kewenangan ini lebih dikenal dengan desentralisasi yang berimplikasi munculnya daerah-daerah otonom. Munculnya otonomi daerah khususnya di kabupaten/kota maka pembangunan di daerah diharapkan menjadi lebih optimal dengan mendorong setiap kabupaten/kota untuk melakukan kerjasama regional dalam rangka meningkatkan daya saingnya di perekonomian global.

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk kawasan kerjasama antar daerah agar terwujudnya pemerataan pembangunan serta peningkatan perekonomian antar daerah termasuk pengurangan disparitas pendapatan antar daerah, hal ini telah diatur didalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional. Terdapat 8 kawasan kerjasama antar kabupaten/kota yang terbentuk di Provinsi Jawa Tengah, yakni salah satunya Kawasan Subosukawonosraten.

Kawasan Subosukawonosraten ialah salah satu kawasan kerjasama yang terdiri dari Kabupaten/Kota terletak di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, pada masa kolonial Belanda kawasan ini adalah wilayah Eks Karesidenan Surakarta yang menjadi wilayah administratif. Pusat dari kegiatan ekonomi Subosukawonosraten yakni Kota Surakarta, kota terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Tujuan dibentuknya kawasan Subosukawonosraten adalah untuk melakukan regionalisasi dengan menekankan kemandirian kabupaten / kota sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta

meningkatkan daya tarik tersendiri sebagai wilayah yang mempunyai potensi untuk kegiatan perdagangan, investasi maupun wisata. Kawasan Subosukawonosraten yang diharapkan menjadi daerah yang mandiri ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan ekonomi, termasuk persoalan ketimpangan/disparitas pendapatan antar kabupaten/kota yang terjadi.

Subosukawonosraten adalah salah satu kawasan andalan yang ada di Jawa Tengah, karena kawasan ini adalah sebagai pusat penggerak pertumbuhan perekonomian wilayah. PDRB per kapita Kawasan Subosukawonosraten mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dari sekitar 26.991.163,73 milyar rupiah pada tahun 2017, menjadi 29.703.183,21 milyar rupiah pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 27.500.539,42 milyar rupiah pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya kontraksi ekonomi yang dipengaruhi oleh pelemahan sektor-sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19. Peningkatan dan penurunan PDRB per kapita di kawasan Subosukawonosraten tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel 1. 1 Rata-rata PDRB Per Kapita (Dalam Miliar Rupiah)  
Kabupaten/Kota di Kawasan Subosukawonosraten 2017-2020**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Rata-rata PDRB Perkapita</b>
Kota Surakarta	61393833.00	64697318.14	68213523.43	66672263.02	65244234.40
Kab. Boyolali	20777022.12	21847612.55	23031007.91	21077673.37	21683328.99
Kab. Sukoharjo	27509853.43	28879265.25	30357748.30	29327149.90	29018504.22
Kab. Karanganyar	27228156.22	28609836.36	30051455.61	28051406.36	28485213.64
Kab. Wonogiri	20778145.31	21790909.26	20778145.31	19710557.27	20764439.29
Kab. Sragen	27089155.28	28558141.29	30154425.99	26989338.51	28197765.27
Kab. Klaten	21409184.39	22503331.39	23669651.80	21803079.78	22346311.84
<b>Subosukawo nosraten</b>	26991163.73	28383114.44	29703183.21	27500539.42	28144500.20

Sumber : BPS diolah kembali oleh penulis, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat, PDRB per kapita pada kawasan Subosukawonosraten mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan dan PDRB per kapita masih belum merata di setiap kabupaten/kota pada kawasan ini. Terdapat kabupaten/kota yang mampu memperoleh PDRB per kapita sangat tinggi dan ada juga kabupaten/kota yang memperoleh PDRB per kapita sangat rendah dibawah rata-rata. Dimana faktanya, Kota Surakarta memperoleh PDRB perkapita tertinggi, sedangkan Kabupaten Wonogiri memiliki PDRB perkapita terendah di kawasan Subosukawonosraten. Pada tahun 2020 PDRB Kota Surakarta mencapai lebih dari 3 kali lipat PDRB perkapita Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Boyolali. Sedangkan PDRB perkapita kabupaten lainnya masih berada di bawah rata-rata PDRB per kapita Kawasan Subosukawonosraten.

Perbedaan PDRB perkapita antar kabupaten/kota diwilayah ini menyebabkan kemungkinan besar terjadinya disparitas pendapatan antar wilayah kabupaten/kota dalam kawasan ini. Disparitas pendapatan antar

wilayah ini merupakan sebuah fenomena yang krusial dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dengan memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk membentuk kemandirian secara ekonomi dan memperoleh kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola potensi ekonomi yang ada sehingga memungkinkan tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang merata. Maka, diperlukan penelitian untuk mengetahui potensi ekonomi apa saja yang dimiliki kawasan subosukawonosraten serta bagaimana perannya dalam mempengaruhi disparitas pendapatan yang terjadi di Kawasan Subosukawonosraten

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam upaya memajukan pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi jangka panjang, setiap daerah memiliki hak dan kewenangan yang sama untuk mengatur urusan daerahnya sendiridan mampu menciptakan kemandirian dengan menggali potensi perekonomian masing-masing daerah termasuk kawasan Subosukawonosraten. Dengan mengetahui potensi ekonomi basis yang dimiliki serta memahami peran masing-masing sektor ekonomi basis dalam pembangunan ekonomi yang tidak merata tentu dapat berfungsi lebih baik kedepannya dengan menentukan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan potensi ekonomi sesuai dengan peran masing-masing dalam ketimpangan pendapatan di Subosukawonosraten dan diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antara Kabupaten/Kota di Kawasan Subosukawonosraten kedepannya.

Adanya gap tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sektor ekonomi mana saja yang menjadi sektor ekonomi basis di Kawasan Subosukawonosraten?
2. Seberapa besar tingkat disparitas pendapatan di kawasan Subosukawonosraten?
3. Bagaimana tipologi klassen daerah di kawasan Subosukawonosraten?
4. Bagaimana peran tiap sektor ekonomi basis terhadap disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Kawasan Subosukawonosraten
2. Mengetahui seberapa besar tingkat disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten
3. Didapatkan klasifikasi tipologi klassen masing-masing kabupaten/kota di Kawasan Subosukawonosraten
4. Identifikasi peran masing-masing sektor basis terhadap disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten

### **1.4 Ruang lingkup**

Objek penelitian ini adalah Kawasan Subosukawonosraten dengan buku data yang digunakan yakni data tahun 2017 hingga 2020, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPS, dan bersifat



kuantitatif. Ditekankan bahwa penulis akan membahas sektor ekonomi basis, tipologi klasifikasi wilayah, derajat disparitas pendapatan antar wilayah/kota.

Agar menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan dan agar tercapainya hasil pembahasan yang rinci dan terfokus, maka ditekankan bahwa penelitian ini akan menganalisis sektor ekonomi basis, tingkat disparitas pendapatan, pola pertumbuhan ekonomi dengan tipologi klassen daerah, serta peran sektor ekonomi basis terhadap disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan nilai kontribusi atas penelitian sebelumnya maupun penelitian kedepannya.
2. Sebagai acuan dan saran untuk mengambil kebijakan dalam penyusunan perencanaan daerah pada tahap selanjutnya bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya tiap kabupaten/kota di Kawasan Subosukawonosraten.